

KRISIS MONETER DAN DAMPAKNYA TERHADAP REPELITA VII

Oleh:

Ginandjar Kartasasmita
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri

Disampaikan pada Rapim ABRI
Jakarta, 10 Februari 1998

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Illahi Rabi yang senantiasa melimpahkan rahmat dan lindungan-Nya kepada kita sekalian. Selanjutnya, dalam suasana yang sangat diwarnai oleh semangat silaturahmi ini, kami juga mengucapkan Selamat Lebaran 1418 Hijriah, *Minal Aidin Wal Faizin*, dan Mohon Maaf Lahir dan Bathin kepada saudara-saudara yang merayakannya.

Seperti kita semua ketahui, bangsa Indonesia sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Krisis ekonomi yang sedang kita alami sekarang secara mendasar telah mengubah kondisi perekonomian Indonesia. Dampak negatifnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kita menurun tajam, disertai dengan pengangguran yang meningkat pesat. Kenaikan harga-harga tidak tertahankan lagi. Keadaan menjadi lebih buruk dengan adanya musim kekeringan yang sangat panjang. Di beberapa daerah telah terjadi rawan pangan yang cukup parah.

Kondisi yang berat ini tentu akan mempengaruhi pembangunan nasional kita di masa depan.

Masalah krisis ekonomi, dan pengaruhnya terhadap formulasi Repelita VII akan menjadi pusat pembahasan saya pada pagi hari ini. Namun, karena Repelita VII harus merupakan penjabaran dari Garis-garis Besar Haluan Negara 1998 yang saat ini belum memperoleh pengesahan oleh wakil-wakil kita di MPR, maka saya akan membahasnya secara garis besarnya saja.

II. KRISIS KEUANGAN

Perkembangan nilai tukar Rupiah yang kita hadapi sejak Agustus hingga awal tahun 1998 ini menunjukkan gejala yang lebih panjang dan lebih dalam. Nilai rupiah telah merosot lebih dari 75 persen sejak bulan Juli 1997 yang lalu. Depresiasi Rupiah, yang banyak pihak menyatakan telah melebihi kewajaran ini, berkembang menjadi krisis ekonomi. Bagaimana proses terjadinya krisis ini masih belum dapat ditentukan secara tepat, namun ada beberapa faktor yang diperkirakan dominan mendorong terjadinya krisis.

Sejak dilepaskannya rentang intervensi dalam bulan Agustus 1997 yang lalu, terdapat faktor internal yang menyebabkan tajamnya penurunan nilai tukar rupiah. Kita harus mengakui adanya faktor imbas dari gejala nilai tukar mata-uang negara-negara tetangga, yang dimulai dari Thailand. Namun, faktor eksternal tersebut diperkirakan lebih kecil efeknya daripada tiga masalah internal perekonomian kita yang mencuat ke permukaan selama dua tahun terakhir.

Masalah *pertama* adalah akumulasi serta membengkaknya kesenjangan tabungan dan investasi masyarakat yang tercermin pula dalam defisit transaksi berjalan. Misalnya dalam kurun waktu 1993/94-1996/97, defisit transaksi berjalan terus mengalami peningkatan dari US\$ 2,9 miliar menjadi US\$ 8,1 miliar.

Kedua, adalah lemahnya sektor perbankan seperti tercermin dari besarnya kredit macet yang disebabkan oleh praktek perbankan yang tidak berhati-hati (*prudent*). Banyak kredit disalurkan bukan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang umum digunakan, misalnya keuntungan. Banyak bank yang menyalurkan hanya kepada kelompok-kelompok bisnisnya. Hal ini tidak saja melanggar ketentuan

perbankan *legal lending limit*, tetapi juga meningkatkan resiko usaha bank yang bersangkutan. Sektor *property* juga mendapatkan kredit yang berlebihan. Industri perbankan yang lemah tersebut menjadi lebih lemah dengan adanya gejolak moneter. Likuidasi 16 bank pada bulan Nopember yang lalu ternyata semakin menggoyahkan kepercayaan nasabah dan kreditor bank kepada sistem perbankan kita. Untuk memulihkan kepercayaan tersebut, sampai Pemerintah perlu memberikan jaminan kepada nasabah dan kreditor Bank, untuk menenangkan para depositor dan berangsur-angsur dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan kita.

Tingginya suku bunga dalam negeri pada waktu yang lalu membuat banyak perusahaan lebih tertarik mencari pinjaman luar negeri yang bersuku bunga lebih rendah, khususnya dalam mata uang dolar AS, daripada dana dalam negeri. Hutang luar negeri swasta meningkat dengan pesat selama Repelita VI ini. Nilai hutang swasta saat ini diperkirakan mencapai sekitar US\$ 73,9 miliar¹, dari keseluruhan hutang luar negeri pada saat ini sekitar US\$ 137,4 miliar. Keadaan ini dianggap sebagai salah satu pemicu krisis ekonomi Indonesia. Dengan adanya gejolak nilai tukar, pihak swasta langsung memburu dolar untuk membayar hutang mereka, walaupun sebagian daripadanya masa jatuh temponya belum tiba. Mereka khawatir bahwa Rupiah akan terus melemah, dan tentu saja akan sangat mengganggu kesehatan perusahaan mereka. Kekhawatiran yang berlebihan ini menjadi kenyataan (*self-fulfilling prophecy*), karena semakin banyak yang memburu dolar maka rupiah semakin melemah. Ini merupakan masalah *ketiga*, yakni besarnya hutang perusahaan swasta kita dalam bentuk dolar.

Krisis moneter yang melanda kawasan Asia ini mengakibatkan rupiah terdepresiasi menjadi sekitar Rp. 10.000 per satu dolar Amerika pada hari terakhir ini. Padahal pada 1 Juli 1997 yang lalu harga satu dolar Amerika masih Rp. 2.430. Jadi depresiasinya adalah 75,8 persen, padahal di negara-negara sekawasan yang juga terkena krisis moneter, depresiasi yang tertinggi adalah 48,8 persen, yaitu mata-uang Baht. Krisis ini mempunyai ramifikasi yang sangat luas. Pertama, perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta yang mempunyai hutang luar negeri dan tidak mengasuransikannya (*hedge*) mengalami kesulitan melunasi pokok dan bunga hutangnya. Sebagian bahkan secara teknis sudah bangkrut oleh karena modal neto sudah negatif. Akibat lanjutannya adalah makin meningkat lagi kredit macet di sektor perbankan, dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Keadaan ini telah menyebabkan makin rendahnya kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional akan prospek perekonomian kita. Masyarakat kita sendiri menjadi enggan menyimpan dananya di perbankan dan cenderung menyimpan uang dalam bentuk dolar. Masyarakat internasional terlebih lagi sangat meragukan kesehatan lembaga keuangan dan perusahaan swasta nasional, yang juga didorong oleh menurunnya peringkat perusahaan swasta nasional kita yang diberikan oleh Standard & Poor dan Moody. Bahkan *Letter of Credit (L/C)* yang dikeluarkan oleh bank swasta nasional tidak diterima oleh eksportir asing, sehingga menimbulkan hambatan terhadap impor, termasuk bahan baku, yang sangat diperlukan.

Kedua, harga bahan baku dan barang antara (*intermediate goods*) terutama yang diimpor meningkat. Sebagai akibatnya, harga barang jadi juga meningkat. Kenaikan tersebut pada akhirnya harus diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Sebagai akibatnya inflasi meningkat.

Kenaikan harga dari kebutuhan masyarakat ini tercermin dari kenaikan tingkat inflasi sejak Oktober 1997, utamanya pada bulan Januari lalu yang mencapai sekitar 6,9 persen, suatu tingkat inflasi tertinggi dalam kurun waktu 20 tahun ini. Inflasi dalam tahun anggaran 1997/98 sampai dengan Januari telah mencapai 16,0 persen. Sebagai negara yang selama 30 tahun berhasil mengendalikan inflasi pada tingkat yang aman sudah tentu keadaan ini sangat mengkhawatirkan. Sudah hampir dapat dipastikan bahwa upah riil buruh, utamanya upah gaji tetap (*fixed income earner*), akan turun cukup besar.

Kita telah merasakan bahwa harga-harga kebutuhan bahan pokok telah meningkat dengan

¹Hutang swasta nasional sebenarnya hanya sekitar US\$ 23,07 miliar, dan sisanya sebagian besar terdiri dari hutang perusahaan patungan dengan pihak luar negeri.

pesat. Selain kebutuhan pokok, penyediaan obat-obatan yang hampir 90 persen bahan bakunya diimpor juga mengalami guncangan. Stok bahan baku untuk obat-obatan yang terbatas, serta menurunnya daya beli masyarakat akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan obat-obatan yang sangat diperlukannya.

Kita harus menyadari bahwa proses penyesuaian dengan situasi baru ini masih belum selesai. Walaupun inflasi dalam bulan Januari lalu sudah mencapai 6,9 persen, proses penyesuaian harga tersebut belum selesai sehingga tingkat harga umum diperkirakan akan masih meningkat. Hambatan terhadap proses penyesuaian harga ini, karena satu dan lain hal, akan berakibat penurunan produksi atau bahkan penutupan perusahaan sama sekali. Penyesuaian yang dilakukan oleh dunia usaha ini akan menyebabkan tingkat pengangguran masih meningkat. Kedua masalah ini, inflasi dan pengangguran yang semakin meningkat, akan menyebabkan daya beli masyarakat akan semakin menurun. Akibatnya akan meningkat pula kerawanan sosial dan ancaman bagi stabilitas politik.

Seperti kita ketahui bersama, asumsi yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 1998/99 adalah nilai tukar sebesar Rp. 5.000 per dolar AS, tingkat inflasi sekitar 20 persen, dan tanpa adanya pertumbuhan riil dari perekonomian kita. Dengan menggunakan asumsi ini, Pemerintah telah menyadari bahwa tingkat pengangguran akan meningkat. Bahkan diperkirakan tingkat pengangguran, mencapai sekitar 10 persen dari angkatan kerja kita, atau sekitar 8,7 juta pekerja, dibandingkan perkiraan tahun 1997 sekitar 5,7 persen atau 5,3 juta pekerja. Bisa kita perkirakan bahwa pengangguran terdidik akan meningkat pesat pula.

Keadaan akan lebih buruk apabila nilai tukar rupiah tidak menguat kembali seperti yang kita harapkan. Memang tidak akan kembali seperti semula, yaitu sekitar Rp. 2.500 per dolar AS, karena dalam tingkat itu Rupiah kita *overvalued*, tetapi di atas Rp. 5.000/6.000, sesungguhnya Rupiah kita menurut perkiraan sudah *undervalued*. Jika keadaan seperti sekarang ini terus berlangsung, perekonomian kita akan mengalami pertumbuhan negatif, suatu keadaan yang tidak pernah kita alami dalam kurun waktu Orde Baru ini. Demikian pula dengan tingkat pengangguran kita yang akan semakin meningkat dengan menurunnya kemampuan penyerapan tenaga kerja akibat pertumbuhan negatif dari perekonomian kita.

Selain krisis ekonomi kita juga mengalami kekeringan yang disebabkan oleh badai El Nino yang mempengaruhi kawasan Asia. Musim kekeringan yang berkepanjangan yang menyebabkan mundurnya musim tanam dan panen pada tahun 1997/98 terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Selain berdampak langsung terhadap penurunan produksi sektor pertanian, musim kekeringan inipun mengakibatkan kebakaran hutan di beberapa daerah, yang pada gilirannya menurunkan produktivitas sektor pertanian. Pada tahun 1997 yang baru lalu, sub-sektor tanaman bahan makanan mengalami pertumbuhan negatif, -1,8 persen, dan demikian juga dengan sektor kehutanan sebesar -0,6 persen. Sedangkan sub-sektor tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan masih dapat tumbuh lebih dari 4 persen.

Memasuki tahun 1998, keterlambatan musim tanam dan panen ini tidak dapat mendorong sektor pertanian untuk segera kembali pulih. Selain itu, ternyata gejala El Nino masih mempengaruhi iklim kita, sehingga musim hujan ini tidak berlangsung seperti biasanya. Sejak bulan Pebruari ini mulai terasa berkurangnya curah hujan di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan di Kalimantan Timur, curah hujan sangat sedikit sehingga kebakaran hutan harus selalu diwaspadai. Sektor pertanian yang diharapkan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada saat yang sulit ini tidak dapat tumbuh secepat yang diharapkan.

Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian ini juga ikut memberikan tekanan berat pada kemampuan perekonomian Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja, apalagi dalam keadaan krisis ekonomi saat ini. Juga mempengaruhi ketersediaan komoditi pangan, sehingga berpengaruh pula pada laju inflasi. Biasanya sektor konstruksi di perkotaan dapat menyerap tenaga kerja yang berasal dari pedesaan dalam musim kemarau. Namun krisis ekonomi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan sektor konstruksi ini berdampak pada penurunan tenaga kerja musiman yang bisa diserap. Pekerja musiman, yang biasanya merupakan tenaga lepas, ini merupakan kelompok sasaran dari program padat kerja yang sudah mulai kita laksanakan.

Pemerintah menyadari bahwa krisis ekonomi akan mempunyai dampak yang besar dan harus ditangani dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat *crash program*. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, Pemerintah telah mengimpor beras. Selain itu diupayakan peningkatan produksi pangan dengan menekan kehilangan hasil panen musim tanam 1997/98, serta meningkatkan intensifikasi dan pemanfaatan lahan-lahan ‘tidur’ (tidak produktif). Sementara itu melalui program padat karya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Kegiatan *crash program* ini diarahkan kepada pekerja berketerampilan rendah di daerah perkotaan dan perdesaan. Sedangkan jenis kegiatannya mencakup rehabilitasi atau pembangunan jalan desa, saluran irigasi, lingkungan dan usaha-usaha produktif lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Dalam penyusunan anggaran tahun mendatang, upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan tetap dilanjutkan dan diprioritaskan. Anggaran rupiah yang didaerahkan mencapai dua per tiga dari seluruh tabungan pemerintah. Dengan alokasi ini diharapkan daerah dapat memelihara momentum pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Upaya penciptaan lapangan kerja juga terus dilanjutkan dan mencakup antara lain program pengembangan wirausaha, serta pengembangan agroindustri dan produksi pangan, yang relatif padat-karya dan tidak begitu terpengaruh oleh melonjaknya nilai tukar Rupiah terhadap mata-uang asing.

Pada tataran makro langkah-langkah untuk mengatasi berkembangnya gejolak nilai tukar Rupiah telah diupayakan sejak awal gejolak. Pemerintah menjalankan kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ketat. Kebijakan fiskal yang dilaksanakan antara lain meliputi penjadwalan kembali beberapa proyek-proyek dan merevisi penggunaan anggaran pembangunan. Sementara itu dalam rangka kebijaksanaan moneter ketat maka suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dinaikkan.

Selain itu Pemerintah telah menyusun program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dan keuangan yang menyeluruh dan mencakup berbagai bidang. Program-program itu meliputi bidang moneter, perbankan, fiskal, perdagangan dalam dan luar negeri, investasi dan privatisasi BUMN. Sejak diumumkannya program reformasi ini oleh Bapak Presiden pertengahan bulan Januari 1998 yang lalu sebagai kesepakatan dengan IMF, telah banyak yang dilaksanakan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan dan Keputusan Presiden serta Instruksi Presiden yang bertujuan menstabilkan sistem perbankan kita dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat, misalnya pembentukan Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, pemberian jaminan atas deposito masyarakat dan pinjaman perbankan, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, penyelesaian utang swasta, dan berbagai program lainnya.

Krisis ekonomi yang sedang kita alami ini merupakan cobaan yang sangat berat bagi perjalanan hidup bangsa kita. Pengangguran diperkirakan masih akan meningkat, sementara harga-harga kebutuhan pokok naik dengan cepat. Keadaan ini mungkin menyebabkan sebagian dari kita mengira bahwa hal ini merupakan akibat dari reformasi yang kita sudah mulai dan akan kita jalankan terus.

Pandangan itu tidak sepenuhnya tepat. Langkah-langkah reformasi ini merupakan langkah yang harus dijalani agar kita dapat keluar dari krisis ekonomi ini. Memang reformasi ini terasa seperti pil pahit yang harus kita ‘telan’. Sebagian dari kita mungkin tidak bisa menerima program-program reformasi yang akan dan sudah dijalankan. Di sinilah diharapkan peran ABRI, yaitu mengamankan pelaksanaan langkah reformasi dengan mencegah oknum-oknum mengail di air keruh.

III. REPELITA VII

Dengan berbagai keadaan seperti yang saya uraikan di atas jelas bahwa sesungguhnya kita sedang dalam keadaan krisis ekonomi yang terparah sejak awal Orde Baru, bahkan oleh duniapun telah dianggap sebagai kondisi yang dapat mengganggu ekonomi kawasan dan ekonomi dunia pada umumnya. Kemungkinan besar sebagian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Repelita VI akan sulit dicapai. Sehingga dalam memasuki Repelita VII kita masih akan mengejar berbagai sasaran yang belum terpenuhi pada Repelita VI.

Dalam proses penyesuaian ini diperkirakan tidak akan terjadi pertumbuhan untuk tahun 1998/99. Kita tidak dapat mengetahui berapa lama kita akan keluar dari krisis ini dan setelah keluar dari krisis berapakah tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut. Mungkin saja tingkat pertumbuhan yang berkelanjutan untuk Indonesia akan berada di bawah pertumbuhan yang biasa kita nikmati selama ini.

Seperti kita ketahui, pertumbuhan ekonomi kita selama ini memang cukup tinggi. Selama 30 tahun terakhir ekonomi Indonesia tumbuh dengan rata-rata 7 persen per tahun. Bahkan, dalam tahun 1996 pertumbuhan ekonomi kita mencapai sekitar 8 persen. Hanya sedikit lebih rendah dari tahun 1995 yang mencapai 8,2 persen. Berdasarkan pengalaman pertumbuhan yang selalu tinggi inilah kita menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi selama PJP II sebesar rata-rata 7 persen per tahunnya. Dengan kata lain, kita bisa menganggap bahwa pertumbuhan 7 persen adalah pertumbuhan yang berkelanjutan sesuai dengan daya dukung perekonomian kita. Namun, dengan perkembangan akhir-akhir ini perekonomian kita mengalami penyesuaian struktural yang sangat drastis. Sehingga sasaran rata-rata pertumbuhan pada Repelita VII sebesar 7 persen untuk sementara ini di luar jangkauan kita.

Potensi pertumbuhan perekonomian ini dapat kita dekati dari sumber-sumber pertumbuhannya, yaitu pertumbuhan modal, tenaga kerja, dan produktivitas. Perlu saya tekankan di sini bahwa prioritas pembangunan dalam Repelita VII tetap pada bidang ekonomi seiring dengan pembangunan SDM, dan landasan kebijaksanaan pembangunan tetap pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas.

Akumulasi modal diperkirakan tidak akan meningkat secepat beberapa tahun terakhir ini. Selama ini Indonesia dianggap sebagai tempat yang menarik untuk melakukan investasi. Investasi langsung luar negeri selalu meningkat dengan pesat. Selain investasi langsung luar negeri, dana luar negeri dalam bentuk pinjaman maupun portofolio-pun meningkat dengan pesat. Indonesia dianggap sebagai tempat yang sangat menguntungkan dalam melakukan investasi. Dengan demikian kita terbiasa dengan masuknya modal dari luar negeri untuk mendukung pembangunan yang sedang kita jalankan. Nampaknya untuk kurun waktu Repelita VII segala keberuntungan ini akan sulit kita peroleh lagi. Berkurangnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap mata uang kita akan mengakibatkan lebih langkanya investasi langsung luar negeri maupun dana luar negeri lainnya. Dalam dua atau tiga tahun ke depan para investor akan sangat berhati-hati sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kondisi ini juga menuntut ABRI untuk tetap dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan kita.

Pemeliharaan stabilitas politik tersebut harus didukung dengan upaya-upaya penyediaan bantuan sebagai jaring penyelamat (*safety net*), khususnya untuk mengurangi beban masyarakat kita yang berpendapatan rendah dan miskin selama proses penyesuaian ini berlangsung. Karena memang saudara-saudara kita inilah yang paling rawan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Saat ini telah dijalankan berbagai proyek padat karya. Proyek-proyek seperti ini mungkin masih akan diperlukan pada awal-awal Repelita VII sehingga lapisan masyarakat yang terkena dampak krisis keuangan mempunyai waktu untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan ekonomi yang baru.

Selain itu, kita juga sudah mendapatkan bukti bahwa untuk membantu saudara-saudara kita ini harus dilandasi dengan konsep pemberdayaan. Kita tidak akan melindungi secara berlebihan. Karena hal ini hanya akan memperlemah. Satu-satunya jalan adalah memberdayakan, memberi akses kepada mereka untuk dapat meningkatkan modal, baik finansial, maupun SDM dengan penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan sosial yang diperlukan seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya. Namun untuk satu dua tahun ke depan ini Pemerintah tampaknya harus kembali memberi subsidi pada masyarakat untuk beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedele, terigu, dan BBM. Secara bertahap subsidi tersebut harus kita kurangi lagi.

Kita tidak boleh melupakan program pengentasan masyarakat miskin. Kita masih bertekad bahwa kemiskinan absolut sebagian besar sudah akan terselesaikan pada akhir Repelita VII. Dalam penanggulangan kemiskinan, kita telah mendapatkan hasil yang cukup menggembirakan, walaupun jumlah penduduk miskin masih besar. Saudara kita yang harus hidup di bawah garis kemiskinan absolut berjumlah 22,5 juta atau sekitar 11,3 persen. Program ini harus dilanjutkan, bahkan

ditingkatkan dalam Repelita VII.

Di samping menjaga stabilitas politik, salah satu tugas utama kita dalam menarik minat investor dalam Repelita VII, adalah melanjutkan proses pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Melanjutkan pemulihan kepercayaan terhadap mata uang rupiah dan pasar modal harus menjadi prioritas utama. Karena hanya dengan kepercayaan yang semakin mantap ini, maka investasi dan oleh karena itu pertumbuhan ekonomi, akan mencapai tingkat yang berkelanjutan lagi.

Pemantapan pelaksanaan reformasi ekonomi harus terus dilanjutkan. Kebijakan ekonomi yang akan diambil dalam Repelita VII harus pula mengacu pada komitmen kita terhadap lingkungan internasional, seperti *WTO*, *APEC* dan *AFTA*.

Sumber pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan angkatan kerja. Secara kuantitas, faktor ini tidak menjadi permasalahan. Namun agar efektif diperlukan sumber daya manusia yang lebih baik. Dalam jangka pendek memang kita tidak akan kekurangan tenaga kerja tetapi pada saat kita terlepas dari resesi ini, apalagi bila struktur industri kita menjelma dengan bentuk yang berbeda, kebutuhan akan sumber daya manusia yang lebih berkualitas tidak dapat dihindari.

Selain itu, telah terbukti selama ini bahwa peningkatan pendidikan masyarakat kita merupakan 'modal' bagi masyarakat kita yang berpendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, selain untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan lebih cepat, pendidikan juga akan memperkecil tingkat kesenjangan pada masyarakat kita.

Untuk itu dalam Repelita VII segala upaya wajib belajar yang telah dilakukan di sekolah dasar akan terus dilanjutkan. Program Wajib Belajar 9 tahun (WAJAR 9 tahun) akan tetap mendapatkan prioritas yang tinggi, sehingga dapat dilakukan sesuai rencana, yaitu selambat-lambatnya tuntas pada Repelita VIII. Perbaikan kurikulum perlu dilakukan pada semua tingkat pendidikan. Upaya peningkatan tingkat partisipasi pada tingkat sekolah menengah pertama dan atas akan terus diupayakan selama Repelita VII ini. Selanjutnya dalam situasi yang sulit ini kita juga tidak akan melupakan pendidikan tinggi. Dalam suasana ekonomi yang makin terbuka dan bebas ini lulusan pendidikan tinggi akan makin dibutuhkan. Sudah tentu pemerintah tidak dapat melakukan sendiri penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Pemerintah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dengan makin banyaknya lulusan perguruan tinggi diharapkan kita akan semakin kompetitif.

Sumber pertumbuhan ketiga adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan kualitas SDM seperti diuraikan di atas akan sangat menunjang peningkatan produktivitas, utamanya setelah proses penyesuaian yang sedang kita alami saat ini. Tidak kalah pentingnya sebagai sumber peningkatan produktivitas adalah realokasi sumber daya ekonomi. Reformasi ekonomi yang sedang kita lakukan akan membebaskan segala macam hambatan dalam realokasi sumber daya ekonomi tersebut. Berbagai keputusan akan lebih banyak dilakukan oleh para pelaku pasar.

Namun penurunan produktivitas tenaga kerja mungkin akan terjadi dalam proses penyesuaian. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan dunia usaha kita untuk tidak begitu saja memecat para karyawannya. Dengan demikian, walaupun produktivitas mungkin akan menurun, namun hal ini masih lebih baik bagi pekerja daripada harus kehilangan pekerjaan. Selain itu, dunia usaha juga akan dapat segera meningkatkan produktivitas usahanya dengan cepat jika proses penyesuaian telah berhasil dilaluinya, tanpa harus mencari dan melatih pekerja baru lagi.

Dalam rangka peningkatan produktivitas tersebut, peningkatan peran pemerintah daerah harus ditingkatkan. Karena pemerintah daerahlah yang merupakan ujung tombak dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah. Pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik daerah dan kebudayaan setempat. Proses umpan balik dari masyarakatpun diharapkan memberikan hasil yang lebih cepat. Sehingga agenda yang penting dalam Repelita VII adalah mendorong proses desentralisasi. Di lain pihak, desentralisasi tidaklah cukup hanya dengan kemauan politik semata. Desentralisasi harus pula dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia di daerah. Karena kemampuan sumber daya yang tidak memadai justru akan menurunkan efisiensi dan efektivitas dari

proyek pembangunan di daerah.

IV PENUTUP

Demikianlah uraian saya mengenai berbagai keadaan serta prioritas yang akan melatarbelakangi pembuatan Repelita VII. Walaupun kita masih menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat ini, tetapi saya percaya bahwa ekonomi kita jauh akan lebih sehat setelah krisis ini terlewati.

Sudah tentu masih banyak lagi program-program penting yang akan masuk dalam Repelita VII, saya mengharapkan Rapim ABRI ini dapat pula memberikan masukan agar dapat ikut mewarnai Repelita VII.